

Artikel

Sinergi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dengan *Non Government Organization* (NGO) Dalam Mengurangi Risiko Bencana Di Kota Padang

Nofia Sari Yanti ^{1,*}, dan Zikri Alhadi ¹

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Corresponding Author: noviasariyanti96@yahoo.com

Abstract

This research was motivated by the condition of Padang City which was at high risk of the earthquake and tsunami. Therefore an integrated and comprehensive disaster risk reduction effort is needed in order to minimize the adverse effects if an earthquake and tsunami occur at a time. The birth of Law No. 24 of 2007 changed the paradigm of disaster management, namely disaster management is the responsibility of the government, business and society. One of the bridges between the government and the community is NGOs. NGOs have a very important role in disaster management, especially in providing information from the public to the government. But in this case the synergy of Padang City BPBD and NGOs in reducing disaster risk is still lacking. This can be seen from efforts to reduce disaster risk dominated by NGOs. The method used in this research is descriptive qualitative method. The technique of collecting data uses observation, in-depth interviews, and documentation studies. Data analysis techniques using triangulation. The results showed that the Synergy of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Padang City with Non Government Organizations (NGOs) in reducing disaster risk in the city of Padang had not been implemented well because cooperation between the BPBD of Padang City and NGOs was like conducting disaster socialization, dominated by NGO. Coordination between the Padang City BPBD and NGOs has also not been effective. This can be seen from several subindicators that have not been implemented properly, namely the continuity of coordination, clear formulation of authority and responsibility and effective communication.

Keywords: Synergy, Disaster Risk Reduction, Padang City BPBD, NGOs

Pendahuluan

Effendi (2012) mengatakan bahwa salah satu daerah yang dijuluki sebagai supermarket bencana dan negeri seribu satu bencana adalah Sumatera Barat. Beliau menyebutkan sedikitnya ada tujuh macam potensi bencana di Sumatera Barat yaitu gempa, tsunami, gunung meletus, longsor, banjir, abrasi pantai, badai dan lainnya. Sumbar atau khususnya pulau sumatera umumnya dilintasi patahan Indo-Australia. Lempeng itu melewati

Samudera Indonesia yang berada pada sisi barat Pulau Sumatera. Biasanya daerah sepanjang lintasan lempeng bumi memiliki gunung berapi aktif. Pergeseran lempeng bumi ini bisa menimbulkan getaran pada permukaan bumi, dan jika pergeserannya berada di dasar laut akan menimbulkan gerakan air laut yang dapat menimbulkan gelombang besar menuju daratan atau tsunami. Alhadi dan Siska (2014) dalam

penelitiannya yang menyebutkan bahwa Kota Padang yang merupakan salah satu daerah di dunia yang paling berisiko bila diterjang tsunami. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Padang tahun 2014-2018 tingkat risiko bencana di Kota Padang adalah sebagai berikut :

Berdasarkan data BPS (2017), Kota Padang memiliki jumlah penduduk sebanyak 927.168 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 1 juta jiwa tersebut, diperkirakan 60 % masyarakat berada pada zona merah tsunami. Bencana dapat mengancam dan

persentase korban selamat pada saat gempa di Jepang :

Berdasarkan survey tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa banyaknya korban selamat dari bencana gempa karena diselamatkan oleh dirinya sendiri. Upaya pengurangan risiko bencana dikota Padang bisa dikatakan masih belum maksimal, hal itu dapat dilihat dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alhadi (2014) yang menyebutkan bahwa kesiapan jalur dan lokasi

Tabel 1: Tingkat Risiko Bencana di Kota Padang

No	Jenis Bahaya	Bahaya		Kerentanan		Kapasitas		Risiko	
		Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat
1	Banjir	0,755	Tinggi	0,727	Tinggi	0,445	Sedang	0,670	Tinggi
2	Gempa Bumi	0,537	Sedang	0,806	Tinggi	0,442	Sedang	0,622	Sedang
3	Tsunami	0,729	Tinggi	0,735	Tinggi	0,409	Sedang	0,667	Tinggi
4	Tanah Longsor	0,567	Sedang	0,556	Sedang	0,335	Sedang	0,590	Sedang
5	Kekeringan	0,654	Sedang	0,785	Tinggi	0,470	Sedang	0,647	Sedang
6	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0,791	Tinggi	0,656	Sedang	0,342	Sedang	0,722	Tinggi
7	Cuaca Ekstrim	0,861	Tinggi	0,774	Tinggi	0,427	Sedang	0,732	Tinggi
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,516	Sedang	0,689					
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	0,333	Rendah	0,773					
10	Gagal Teknologi	0,662	Sedang	0,664					

Sumber : Kajian Risiko Bencana B

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, serta merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian harta benda serta dampak psikologis terhadap masyarakat. Berikut adalah perkiraan dampak jika terjadi

Tabel 2: Perkiraan dampak jika terjadi tsunami

Luasan Bahaya	Penduduk terpapar	Kerugian	Kerusakan Lingkungan
6,440.67 Ha	273,755 Jiwa	1,125,047 Juta Rupiah	2,668.65 Ha

Sumber : Dokumen Rencana Kontijensi Kota Padang Menghadapi Bencana Tahun 2017

tsunami di Kota Padang :

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa Kota Padang memiliki dampak yang sangat besar jika terjadi tsunami. Oleh karena itu

diperlukan sebuah upaya pengurangan risiko bencana yang maksimal agar dapat meminimalisir dampak buruk jika terjadi tsunami. Berdasarkan hasil survey Great hansin Earthquake 1995 di jepang persentase terbesar korban selamat dari bencana gempa berada pada diri sendiri. Berikut adalah data

Tabel 3: Persentase korban selamat dari gempa di Jepang

No	Korban Selamat Oleh	Persentase
1	Diri Sendiri	35 %
2	Anggota Keluarga	31,9 %
3	Teman/Tetangga	28,1 %
4	Orang lewat	2,6 %
5	Tim SAR	1,7 %
6	Lain-Lain	0,9 %

Sumber : Data BPBD Kota Padang

evakuasi publik menghadapi bencana gempa dan tsunami yang ada di Kota Padang belum mencukupi sehingga upaya penyelamatan diri menjadi sulit. Hal ini membuktikan bahwa kesiapsiagaan terhadap bencana di Kota Padang bisa dikatakan masih kurang meskipun sudah memiliki kebijakan yang lebih maju dibandingkan daerah lainnya. Febriana, dkk (2015) mengatakan bahwa kesiapsiagaan terhadap bencana sangat diperlukan karena dapat membangun kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Penelitian selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Nover (2015) dalam hasil penelitiannya dinyatakan bahwa pemerintah Kota Padang sudah memperhatikan faktor kesiapsiagaan namun masih bersifat incidental dan belum terlaksana secara berkelanjutan.

Selain itu berdasarkan data wawancara dari staf Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang beliau mengatakan bahwa program pengurangan risiko bencana di Kota Padang belum

seluruhnya tercapai. Seperti program Padang Kota Cerdas Bencana baru 2 turunan program yang dapat direalisasikan yaitu Sekolah Cerdas Bencana (SCB) dan Keluarga Cerdas Bencana (KCB). Hal ini disebabkan karena keterbatasan biaya yang dimiliki oleh BPBD Kota Padang dalam merealisasikan program tersebut. Selain itu keterbatasan sumber daya manusia di BPBD Kota Padang juga menjadi kendala kurang berjalannya program-program pengurangan risiko bencana.

Melihat masih terbatasnya biaya dan SDM di BPBD Kota Padang dalam melakukan pengurangan risiko bencana maka BPBD Kota Padang perlu bersinergi dengan NGO/ LSM. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, namun ada 3 pilar dalam kebencanaan yang harus saling bahu membahu dalam penanggulangan bencana terutama pada fase sebelum terjadi bencana yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Jadi, pengurangan risiko bencana tidak dapat dititik beratkan kepada pemerintah saja, namun masyarakat sebagai subyek yang akan terkena langsung oleh dampak dari bencana maka juga harus berpartisipasi aktif dan berupaya agar dapat meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan jika suatu waktu terjadi bencana.

Untuk menguatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana maka NGO memiliki peran sangat penting dalam memberikan sosialisasi dan edukasi bencana dikalangan masyarakat. Berdasarkan Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa peran relawan/NGO dalam pengurangan risiko bencana adalah penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bersama masyarakat, penyuluhan kepada masyarakat, penyediaan informasi pengurangan risiko bencana dan peningkatan kewaspadaan masyarakat. BPBD Kota Padang sebagai lembaga pemerintahan yang menangani masalah bencana maka harus bersinergi dengan NGO agar upaya pengurangan risiko bencana dapat terlaksana dengan baik.

Dwinugraha (2016) mengartikan sinergi sebagai sebuah operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Firmansyah (2016) mengatakan bahwa sinergisitas muncul dari adanya kebutuhan untuk membangun

masyarakat atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan dan dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang rasional, terbuka, dan demokratis. Untuk membangun sinergisitas diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara aktor kepentingan yang berpadu. Namun dalam bersinergi dengan NGO, koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang yang melibatkan NGO dan pihak sekolah bisa dikatakan masih lemah. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan program Sekolah Cerdas Bencana (SCB) pada tahun 2018. Pihak BPBD Kota Padang tidak berkoordinasi dengan pihak sekolah, sehingga ketika NGO datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi bencana ditolak oleh pihak sekolah. Alasan penolakannya yaitu karena sosialisasi tersebut bertepatan dengan hari ujian dan hari libur di sekolah. Akibatnya sosialisasi tidak dapat dilakukan pada sekolah yang sudah terdaftar dalam Sekolah Zona Merah Tsunami tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sinergi BPBD Kota Padang dengan Non Government Organization (NGO) dalam mengurangi risiko bencana di Kota Padang. Selain itu juga mendorong baik BPBD Kota Padang dengan Non Government Organization (NGO) dalam mengurangi risiko bencana di Kota Padang. Selain itu juga mendorong baik BPBD Kota Padang maupun Non Government Organization (NGO) agar lebih bersinergi dalam membuat program-program yang berkaitan dengan pengurangan resiko bencana Di Kota Padang dimasa yang akan datang.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di kantor BPBD Kota Padang, kantor Kogami, kantor Mercy corp, kantor Jemari Sakato, kantor Forum PRB Kota Padang, dan kantor Forum KSB Kota Padang. Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi, dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan untuk teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Nurtam (2015) mengatakan bahwa sinergi adalah sebuah bentuk kerjasama masing-masing pihak yang menghasilkan Win-win solution melalui kolaborasi tanpa adanya perasaan kalah. Lebih lanjut Covey (2013) juga mengatakan inti dari sinergi adalah menghargai perbedaan, membangun kekuatan dan mengimbangi kelemahan. Bersinergi bertujuan memadukan bagian-bagian yang terpisah. Jika dikaitkan dengan 3 pilar penanggulangan bencana maka menurut Wahyudi (2017) sinergi dalam penanggulangan bencana berarti keterpaduan berbagai unsur pelaku kebencanaan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Penelitian ini menggunakan indikator Sinergi yang dikemukakan oleh Wahyudi (2017) yaitu kerja sama dan koordinasi.

a. Kerjasama

Indikator ini beragumen bahwa Kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama. Dengan adanya kerjasama, maka secara otomatis kedua instansi tersebut akan melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Dengan diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2007, maka membawa suatu kesadaran bagi pemerintah termasuk BPBD Kota Padang untuk membangun jaringan dan kerjasama terutama untuk pengurangan risiko bencana dengan NGO. Berdasarkan analisis dilapangan maka untuk menciptakan sebuah kerjasama yang sinergis antara BPB Kota Padang dan NGO dalam mengurangi risiko bencana maka adanya peran dari masing-masing aktor penanggulangan bencana tersebut yaitu BPBD Kota Padang, Mercy Corps Indonesia, Jemari Sakato, Kogami, Forum Kelompok Siaga Bencana, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana dalam melakukan sosialisasi dan edukasi bencana. Aktor dalam pengurangan risiko bencana tersebut bersama-sama melakukan pengurangan risiko bencana dengan kapasitas yang dimilikinya masing-masing agar mendapatkan output yang lebih baik.

Program Pengurangan risiko bencana yang disinergikan atau bekerjasama dengan NGO

adalah Program Padang Kota Cerdas Bencana. Outcome yang ingin dicapai dalam program Padang Kota Cerdas bencana adalah terbentuknya Kelurahan Cerdas Bencana, Keluarga Cerdas Bencana, Sekolah Cerdas Bencana, Kampus Cerdas Bencana, Tempat Les Cerdas Bencana, Rumah Sakit Cerdas Bencana, Rumah Ibadah Cerdas Bencana, Pasar Cerdas Bencana, Mall Cerdas Bencana dan Hotel Cerdas Bencana. Namun sampai saat ini yang baru bisa diimplementasikan adalah 2 program yaitu Sekolah Cerdas Bencana (SCB) dan Keluarga Cerdas Bencana (KCB). Dalam melakukan kegiatan Sekolah Cerdas Bencana, BPBD Kota Padang bekerja sama dengan Mercy Corps Indonesia, POF BPBD Provinsi Sumbar, DRRI, Kogami, dan Jemari Sakato. Sedangkan untuk Keluarga Cerdas Bencana maka BPBD Kota Padang membuat sebuah Kelompok Siaga Bencana (KSB) untuk melakukan sosialisasi ke rumah-rumah warga yang berada di zona merah tsunami. KSB berperan sebagai pemberi penyuluhan kebencanaan secara langsung kepada masyarakat dengan metode "door to door".

Adapun output yang diharapkan dari kegiatan Sekolah Cerdas Bencana dan Keluarga Cerdas Bencana yang bekerja sama dengan NGO adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Output SCB dan KCB

	Sekolah Cerdas Bencana	Keluarga Cerdas Bencana
Output	a. Terbentuknya tim sekolah cerdas bencana b. Teridentifikasi risiko bencana di sekolah c. Adanya prosedur tetap saat darurat bencana di sekolah d. Adanya peta evakuasi di sekolah	a. Keluarga tahu potensi bencana ditempat tinggalnya b. Keluarga tahu titik berbahaya dirumahnya c. Mengetahui ciri-ciri gempa dan tsunami dan tahu apa yang harus dilakukan ketika

- mengetahui ciri-ciri tersebut
- d. Tahu lokasi aman jika terjadi tsunami
 - e. Punya rencana evakuasi keluarga
 - f. Memiliki TASIBAT

- secara cepat dari NGO lainnya diluar daerah terkait dampak bencana.
- KOGAMI
 - a. Sebagai fasilitator dalam kegiatan Sekolah Cerdas Bencana.
 - b. Pendamping BPBD Kota Padang dalam implementasi program-program pengurangan risiko bencana
 - Forum PRB Kota Padang
 - a. Membuat modul untuk bahan sosialisasi dan edukasi kebencanaan untuk Sekolah Cerdas Bencana
 - b. Lembaga pendamping dalam melakukan sosialisasi dan simulasi di sekolah pinggir pantai
 - c. Wadah komunikasi aktor kebencanaan agar tidak adanya kekakuan dalam birokrasi antara pemerintah, NGO dan stakeholder lainnya saat terjadi bencana.
 - Forum KSB Kota Padang
 - a. Wadah koordinasi antara Kelompok Siaga Bencana dalam penanggulangan bencana
 - b. Memberikan informasi kepada BPBD Kota Padang terkait adanya potensi bencana di Kota Padang.
 - c. Melakukan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko korban bencana

Sumber : Diolah oleh peneliti

Adapun peran dari masing-masing aktor kebencanaan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

LEMBAGA	PERAN
BPBD Kota Padang	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan dana dan fasilitas-fasilitas sosialisasi seperti modul, brosur, dan lain-lainnya untuk NGO dalam memberikan sosialisai SCB dan KCB b. Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah yang akan mengikuti SCB c. Sebagai pengarah, koordinator, monitoring dan evaluasi dalam kegiatan Sekolah Cerdas Bencana
Mercy Corps Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat kapasitas BPBD dan masyarakat. b. Membantu menyediakan anggaran dan di subgradekan kepada Jemari SAKATO untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat.
Jemari Sakato	<ul style="list-style-type: none"> a. Sebagai fasilitator dalam kegiatan Sekolah Cerdas Bencana untuk membangun kapasitas Sekolah dalam menghadapi bencana. b. Leader dalam program KAHA. KAHA bertujuan untuk memperoleh informasi

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa BPBD Kota Padang dan NGO kebencanaan yang bergerak dalam bidang pengurangan risiko bencana seperti Mercy Corps Indonesia, Jemari Sakato, Kogami, F PRB Kota Padang dan F KSB Kota Padang memiliki peran yang berbeda-beda. Adapun peran dari masing masingnya saling melengkapi kekurangan satu sama lainnya. Namun dalam hal ini terlihat bahwa upaya pengurangan risiko bencana seperti melakukan sosialisasi didominasi oleh NGO.

b. Koordinasi

Menurut Hayati (2014) dalam bersinergi, kita juga harus berkoordinasi satu sama lain sehingga terwujudnya suatu kegiatan yang efisien. Dalam hal berkoordinasi maka moekijat (dalam hayati, 2014) ada 9 syarat untuk mewujudkan koordinasi efektif. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya melihat koordinasi dari 7 sub indikator yang dikemukakan oleh moekijat (dalam hayati, 2014) untuk menganalisis sinergi BPBD Kota Padang dengan NGO dalam mengurangi risiko bencana di Kota Padang, yaitu :

a) Hubungan langsung

Menurut moekijat (dalam Rahmawati, dkk. 2014) bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung. Berdasarkan analisis dilapangan maka ditemukan bahwa hubungan langsung yang terjalin antara BPBD Kota Padang dan NGO telah berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya BPBD Kota Padang untuk mengumpulkan semua insan kebencanaan dengan tujuan dapat berbagi informasi secara langsung terkait dengan isu-isu kebencanaan di Kota Padang dalam agenda "Cofee Morning". Coffee morning ini merupakan sebuah agenda rutin yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang sebagai wadah bertukar informasi kebencanaan di Kota padang dan hubungan berkomunikasi secara langsung merumuskan berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana.

Didalam agenda coffee morning insan kebencanaan seperti BPBD, lembaga pemerintah dan NGO bersama sama memberikan masukan, saran, update kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan isu-isu hangat yang sedang dibicarakan. Jadi untuk hubungan langsung BPBD dan NGO sudah bisa dikatakan baik walaupun masih ada kekurang-kekurangan yang menjadi kendala dalam berkoordinasi yaitu Cofee Morning ini dalam agendanya dilakukan setiap 1 bulan sekali, namun agenda ini tidak sepenuhnya dapat terlaksana setiap 1 bulan sekali secara rutin.

b) Kesempatan awal

Kesempatan awal berkaitan dengan keterlibatan NGO dalam membuat perencanaan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana. Artinya demi tercapainya koordinasi yang baik maka BPBD Kota Padang perlu melibatkan NGO dalam membuat perencanaan karena NGO merupakan salah satu aktor kepentingan

dalam penanggulangan bencana. Dengan melibatkan NGO dalam merumuskan program dan kebijakan penanggulangan bencana maka dalam implementasinya akan lebih mudah karena NGO lebih paham akan perannya masing-masing. Selain itu dengan dilibatkannya NGO dalam perencanaan awal maka data-data yang didapatkan akan lebih detail dan akurat karena NGO merupakan organisasi yang dekat dengan masyarakat dan otomatis lebih tahu akan kebutuhan-kebutuhan dan keluhan masyarakat dalam bencana.

Berdasarkan analisis dilapangan bahwa kesempatan awal NGO dalam pembuatan program dan kebijakan yang berkaitan dengan bencana sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari inisiatif BPBD Kota Padang melibatkan NGO dalam menyumbangkan pikiran, ide dan gagasan terkait program dan kebijakan pengurangan risiko bencana yang akan dibuat. Misalnya dalam perencanaan kontingensi, pembuatan kajian risiko bencana, perencanaan jalur evakuasi kota padang dan program Kota cerdas bencana. Selain itu beberapa NGO kebencanaan di Kota Padang juga menilai BPBD Kota Padang cukup aktif dalam melibatkan insan kebencanaan dalam pembuatan program dan kebijakan. BPBD merangkul semua NGO yang ada di Kota Padang untuk memberikan ide-ide, masukan, dan saran dari NGO. Kemudian BPBD Kota Padang merumuskan program dan kebijakan itu untuk dapat direalisasikan.

c) Keberlanjutan koordinasi

Keberlanjutan koordinasi merupakan proses harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan. Keberlanjutan program pengurangan risiko bencana sangat diperlukan agar koordinasi yang dilakukan tetap terarah. Berdasarkan temuan dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa belum adanya keberlanjutan koordinasi pada semua tahap. Hal ini dilihat dari rapat koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang sebelum kegiatan SCB dan KCB dilakukan. Dalam rapat koordinasi tersebut BPBD Kota Padang sudah melakukan koordinasi dengan NGO dengan cara membagi tugas kepada NGO untuk melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Namun pada tahap pelaksanaan kegiatan koordinasi untuk kegiatan Sekolah Cerdas Bencana, BPBD Kota Padang tidak memiliki koordinasi dengan pihak sekolah. Hal ini menyebabkan kegiatan sosialisasi tersebut ditolak oleh sekolah dikarenakan tidak adanya

pemberitahuan terlebih dahulu dengan pihak sekolah karena berbentrok dengan jadwal ujian sekolah.

d) Kedinamisan

Kedinamisan berkaitan erat dengan kemampuan suatu organisasi untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Hal ini dapat dilihat dari program-program baru yang dicetuskan BPBD bersama NGO seperti SCB dan KCB. Kehadiran dari SCB dan KCB berangkat dari pelajaran bencana pada tahun 2009 yang mengakibatkan banyaknya jatuh korban jiwa karena kurangnya edukasi mitigasi bencana di masing-masing sekolah dan keluarga.

Oleh karena itu BPBD Kota Padang bersama NGO lebih mengoptimalkan pemberian edukasi mitigasi bencana melalui program SCB dan KCB, yaitu program dari sekolah ke sekolah (school to school) dan dari rumah ke rumah (door to door) yang telah diagendakan dalam periode waktu tertentu dengan cara sosialisasi dan simulasi bencana, kemudian tim sosialisasi akan memberikan sticker sebagai penanda bahwa telah dilaksanakan sosialisasi sebelumnya. Program seperti ini dinilai dan dirasa oleh BPBD lebih optimal dibandingkan mengadakan pelatihan pada waktu tertentu dengan jumlah peserta yang telah ditentukan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan koordinasi yang efektif maka program-program dan kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh BPBD Kota Padang dan NGO sudah bisa dikatakan dinamis, hal ini dapat dilihat dari kemampuan BPBD Kota Padang dan NGO dalam merubah strategi untuk membangun budaya sadar bencana baik di sekolah-sekolah maupun rumah-rumah masyarakat.

e) Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas penting untuk memperoleh koordinasi efektif. Dalam hal berkoordinasi dengan NGO maka yang menjadi tujuan dari BPBD sudah jelas tertuang dalam visinya yaitu "Menjadikan Padang Kota Cerdas Bencana. Dengan sudah adanya visi BPBD yang tertuang dalam Renstra BPBD Kota Padang 2014-2019 sudah dapat menjadi acuan bagi BPBD Kota Padang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Selain itu NGO seperti Kogami, mercy corp, jemari sakato, F PRB dan F KSB Kota Padang juga sudah memiliki tujuan yang

hendak dicapainya dalam hal penanggulangan bencana, yaitu membangun budaya siaga bencana. hal tersebut merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh NGO kebencanaan di Kota Padang untuk mengurangi korban jiwa yang berjatuh saat terjadi bencana.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa BPBD Kota Padang selaku pemegang mandat pemerintah dalam bidang bencana dan NGO kebencanaan sebagai salah satu aktor penting dalam kebencanaan sudah memiliki tujuan yang jelas dalam penanggulangan bencana. Dengan adanya tujuan yang jelas tersebut maka sinergisitas antara BPBD Kota Padang dengan NGO akan mudah dilakukan karena sudah tahu mau diarahkan kemana kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana yang dilakukan.

f) Perumusan wewenang dan tanggungjawab yang jelas

Dalam perumusan wewenang dan tanggung jawab berkaitan erat dengan peran dari masing-masing stakeholder terkait. BPBD Kota Padang dan NGO memiliki perannya masing-masing dalam bersinergi. BPBD Kota Padang berperan sebagai leading sector dalam penanggulangan bencana artinya BPBD Kota Padang yang menjadi koordinator yang membawahi NGO lainnya. BPBD Kota Padang sebagai instansi pemerintah berwenang untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kota Padang, mulai dari kebijakan sebelum bencana, saat bencana dan sesudah bencana. Dalam hal ini segala kebijakan tentang penanggulangan bencana dibuat dan dirumuskan oleh BPBD Kota Padang. Sedangkan NGO merupakan pendamping atau mitra bagi BPBD Kota Padang dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh BPBD Kota Padang. Misalnya dalam program Padang Kota Cerdas Bencana yang dibuat BPBD Kota Padang, maka NGO dijadikan sebagai perencanaan grand design, pelaksanaan teknis, dan fasilitator.

Indikator perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dinilai cukup baik. Hal ini dilihat dari SK Kalaksa BPBD Kota Padang No. 60 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Dan Fasilitator Kegiatan Sekolah Cerdas Bencana. dalam SK tersebut dapat dilihat secara jelas bahwa sudah ada pembagian tanggung jawab masing-masing tenaga ahli dan fasilitator dalam kegiatan Sekolah Cerdas Bencana. Dimana ada yang berperan dan

bertanggungjawab sebagai pengarah dan koordinator dan ada yang berperan dan bertanggungjawab sebagai anggota dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perumusan tugas dan wewenang yang jelas sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari SK yang dikeluarkan oleh KALAKSA BPBD Kota Padang mengenai kegiatan Sekolah Cerdas Bencana.

g) Komunikasi yang efektif

Dalam rangka menghasilkan hubungan yang sinergi maka harus menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik, karena pada dasarnya sinergitas akan terjadi apabila terjadi koordinasi dan komunikasi yang baik antara keduanya. Komunikasi merupakan cara yang digunakan sumber untuk menyampaikan informasi dan kemudian si penerima pesan memberikan rangsangan atas informasi yang disampaikan. Munculnya rangsangan ini artinya adanya timbal balik dari si penerima sehingga terjadilah pertukaran informasi.

Dalam hal ini BPBD Kota Padang berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan NGO melalui agenda coffee morning setiap bulannya dan rapat koordinasi setiap tahunnya. Dalam agenda coffee morning yang dilakukan setiap bulannya memang sudah terjalin komunikasi yang multi arah antara BPBD Kota Padang dan pemangku kepentingan lainnya. BPBD Kota Padang membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada NGO untuk memberikan ide, masukan dan saran untuk kegiatan kedepannya. Namun dalam rapat koordinasi, komunikasi yang terjalin bisa dikatakan belum efektif hal ini dibuktikan dengan rapat koordinasi yang hanya bersifat memberikan materi saja dan tidak dilakukannya sebuah rumusan dari pihak-pihak yang terlibat dalam rapat koordinasi tersebut. Sehingga maksud dari rapat koordinasi itu tidak tersampaikan dengan baik.

Selain beberapa agenda rapat yang bersifat satu arah, komunikasi yang terjalin antara BPBD Kota Padang dinilai tidak bersifat mengikat. Artinya tidak ada keharusan bagi NGO untuk harus ikut dalam rapat tersebut. NGO yang sifatnya relawan terkadang tidak selalu hadir memenuhi undangan rapat dari BPBD Kota Padang.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Sinergi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dengan Non Government Organization (NGO) dalam mengurangi risiko bencana di Kota Padang belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari 2 indikator yaitu kerjasama dan koordinasi yang belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari upaya pengurangan risiko bencana seperti sosialisasi dan edukasi bencana yang didominasi oleh NGO kebencanaan di Kota Padang. Dan koordinasi antara BPBD Kota Padang dan NGO dalam mengurangi risiko bencana yang belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa subindikator yang belum terlaksana dengan baik yaitu keberlanjutan koordinasi, perumusan wewenang dan tanggungjawab yang jelas dan komunikasi yang efektif.

Daftar Pustaka

- Alhadi, Zikri dan Siska Sasmita, 2014. Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Padang Dalam Menghadapi Resiko Bencana Gempa Dan Tsunami Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kesiapsiagaan Terhadap Resiko Bencana). *Humanus Vol. Xiii No.2 Th. 2014*
- Badan Pusat Statistik Kota Padang tahun 2017
- Covey, 2013. *The Seven Habits of Highly Effective People* (7 kebiasaan manusia yang sangat efektif). Tangerang Selatan : Binarupa Aksara
- Dwinugraha, Akbar Pandu, 2016. Sinergisitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Volume 2, Nomor 1, April 2017*
- Effendi, Dkk, 2012. *Ranah Minang Siaga Bencana*. Padang : Lsm Banio
- Febriana, dkk. 2015, Kesiapsiagaan Masyarakat Desa Siaga Bencana Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Kebencanaan (JKA) Pascasarjana Universitas Syariah Kuala Volume 2, No. 3, Agustus 2015*
- Firmansyah, M Irwanda, 2016. Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Bpjs Kesehatan Dengan Organisasi Profesi Dalam Penyediaan Layanan Kesehatan Di Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik Volume 4, Nomor 2, Mei-Agustus 2016 ISSN 2303 – 341X*
- Hayati, Nafizah, 2014. Sinergi Lembaga-Lembaga Pemerintahan/Bumn Dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Samarinda. *Ejournal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 4, 2014: 3482-3496*
- Kajian Risiko Bencana Kota Padang Tahun 2016, yang tertuang pada Dokumen Rencana Kontijensi Kota Padang Menghadapi Bencana Tahun 2017
- Novert. 2015, Evaluasi kebijakan Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat kota padang dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami. *Jurnal kajian ilmu*

administrasi Negara volume 3 nomor 2 tahun 201, hal 13-28

Nurtam, Muchamad, 2015. Penguatan Sinergitas Pemerintah, Masyarakat Dan Dunia Usaha Dalam Penanganan *administrasi Negara volume 3 nomor 2 tahun 201, hal 13-28*

Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana Darurat Bencana Kebakaran *Strengthening Synergy Government, Community And Business Handling In Fire Emergency Disaste. Jurnal Administrasi Kebakaran Edisi ke -9*

Rahmawati, Dkk, 2014. Sinergitas *Stakeholders* Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (Semipro). *Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 4, Hal. 641-647*

Rencana Kontijensi Kota Padang Menghadapi Bencana Tahun 2017

SK Kalaksa BPBD Kota Padang No. 60 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Dan Fasilitator Kegiatan Sekolah Cerdas Bencana.

Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Wahyudi, Yoyok. 2017, Sinergi Satuan Komando Kewilayahan

Dengan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Di Kodim 0609/ Kab. Bandung). *Jurnal Prodi Strategi Kampanye Militer Desember 2017 Volume 3 Nomor 3*